

POLA RESTRUKTURISASI USAHA PERTANIAN DAN USAHA KECIL PEDESAAN SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP REPOSISI KELEMBAGAAN KOPERASI*)

Abstract

This study aims at : (1) identifying cooperative institution flexibility in anticipating dynamic of change affected by restructure of agriculture business; (2) analyzing participation of cooperative members in cooperative role reposition; (3) organizing and improving model of guidance and in agricultural cooperative management development. This study was carried out in 10 provinces by purposive sampling in which we used primer and secunder data. Then it was used and improved for guidance and development of cooperative management in agriculture sector based on focus group discussion (FGD) with related institution, then to be analyzed descriptively by using Microsoft Excel program and SPSS version 11.0. Cooperative role in off-farm sector is very low when seen from corporation status as processing industry with less than 1 % agricultural sector of cooperatives operating in agricultural processing industry with exception in veterinary sector of 3%. Model of agribusiness institution to be developed including farmers become one of factors for supply chain management where farmers are to be positioned as subject of decision maker not just workers.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama Pembangunan Jangka Panjang ke 1 (PJP-1) Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator antara lain : (a) pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5% mulai tahun 1970 samapi tahun 1997, (b) jumlah penduduk miskin secara relatif dan absolut berkurang, (c) penurunan riil pertumbuhan penduduk dari 2,4% hingga 1,9%, (d) perbaikan infrastruktur jalan, kesehatan dan telekomunikasi. Kemajuan ekonomi di Indonesia sekarang dapat dikatakan telah mengalami perbaikan yang cukup berarti, namun demikian masih banyak menghadapi berbagai masalah yang harus diselesaikan dalam pembangunan tahap ke II abad ke 21, karena ternyata keberhasilan tersebut belum mampu mengangkat kehidupan ekonomi rakyat di pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian.

Padahal Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki kondisi dimana : (a) sektor pertanian memegang peranan strategis sebagai sumber mata pencaharian bagi penduduk yang tersebar, (b) memproduksi komoditi primer baik untuk konsumsi maupun industri pengolahan, (c) tempat pelemparan hasil industri dan (d) pertanian masih

*) Hasil Kajian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Tahun 2004 (diringkaskan oleh : Togap Tambunan)

merupakan kantong penduduk miskin. Masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan sektor pertanian adalah belum tersedianya konsep dan strategi pembangunan pertanian yang jelas, dikaitkan dengan peranan kelembagaan koperasi yang mampu mengangkat tingkat pendapatan koperasi dan masyarakat pedesaan.

Guna memecahkan masalah diatas khususnya untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, keteringgalan, peningkatan produktivitas ekonomi pedesaan dalam waktu 26 tahun terakhir (1969-2003) pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan antara lain : (a) melipatgandakan produksi pangan terutama beras melalui introduksi teknologi baru (bibit unggul dan pupuk), (b) mendorong koperasi pedesaan untuk penyalur input dan pemasaran hasil pertanian, (c) program pembangunan desa miskin melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT), (d) perkembangan perkebunan inti rakyat diberbagai komoditi pertanian dan (e) berbagai program lain yang penting perlu dicatat yaitu *Green Revolution* (intensifikasi tanaman padi). Namun berbagai terobosan program baru tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara baik.

Dalam mengantisipasi kondisi sebagaimana disebutkan diatas, kelembagaan koperasi perlu direposisi agar koperasi di pedesaan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Reposisi ini dimaksudkan supaya koperasi di pedesaan memiliki kompetensi untuk mengelola usaha pertanian yaitu kegiatan agribisnis dan agroindustri, meliputi kegiatan : (1) *up-stream* (hulu) yaitu penyaluran kredit dan sarana produksi, (2) *on-farm* yaitu produksi yang dilakukan oleh anggota, serta (3) *off-farm* (hilir) yaitu pengolahan dari yang sederhana sampai agroindustri dan pemasaran.

Aspek studi dalam penelitian ini meliputi : (1) Melakukan studi dan evaluasi kondisi riil saat ini terhadap koperasi dibidang pertanian dan usaha kecil pedesaan. (2) Mengklasifikasi tipe koperasi dibidang pertanian dan faktor-faktor penghambat. (3) Menyusun desain pengembangan koperasi dibidang pertanian dan usaha kecil pedesaan. (4) Menyusun *draft election* pengembangan koerasi dibidang pertanian.

Pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) bagaimana fleksibilitas kelembagaan koperasi dalam mengantisipasi dinamika perubahan akibat restrukturisasi usaha pertanian, (2) bagaimana partisipasi anggota koperasi dalam reposisi peran koperasi. (3) bagaimana model pembinaan dan pengembangan manajemen koperasi bidang pertanian.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji pengaruh pola restrukturisasi usaha pertanian dan usaha kecil pertanian serta implementasi terhadap reposisi kelembagaan koperasi dengan melakukan kajian antara lain : (1) mengidentifikasi fleksibilitas kelembagaan koperasi dalam mengantisipasi dinamika perubahan akibat restrukturisasi usaha pertanian, (2) menganalisis partisipasi anggota koperasi dalam reposisi peran koperasi, (3) menyusun dan menyempurnakan model pembinaan dan pengembangan manajemen koperasi dibidang pertanian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Landasan Teori

Sejak pemerintahan orde baru kegiatan pertanian diarahkan kepada bagaimana pencapaian produksi atau lebih kepada pengembangan subsistem usaha pertanian. Pada kegiatan *on-farm* yang didukung dengan kebijakan untuk peningkatan produksi melalui program intensifikasi pertanian. Hal ini terkait dengan program pemerintah melalui pengadaan pengairan, sarana produksi, benih unggul, pestisida serta pembukaan lahan-lahan pertanian terutama di luar Jawa seperti proyek gambut sejuta hektar di Kalimantan. Program tersebut bermuara pada pengadaan pangan nasional. Namun disadari bahwa program tersebut belum memberi kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani (Soetrisno, 2003).

Penjabaran UU Nomor 12 Tahun 1967 khususnya menyangkut pembangunan pedesaan dinyatakan dalam kebijaksanaan pemerintah melalui Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pembinaan Badan Usaha Unit Desa (BUUD).

Kelembagaan suatu organisasi ekonomi perlu mendapat perhatian lebih besar. Berkaitan dengan pandangan kelembagaan atas struktur hak kepemilikan dan perkembangan kegiatan koperasi. Cook (1995) menyatakan bahwa koperasi akan berkembang secara bertahap, dimana tantangan yang dihadapi pada setiap tahap adalah hasil dari perubahan struktur hak yang dialami pada tahap sebelumnya.

Cook (1995) mendasari hipotesa yang diajukannya mengenai perkembangan koperasi pada hasil penelitiannya dan hasil penelitian lain seerta data perkembangan koperasi pertanian dan pedesaan di Amerika dan Kanada dari tahun 1951-1961. Selama periode tersebut terdapat koperasi yang berhenti berusaha, ada koperasi yang tetap dan bertahan dan ada koperasi-koperasi baru yang tumbuh. Dalam rentang 40 tahun yang diamati beberapa koperasi lahir, tumbuh dan berkembang serta beberapa koperasi tutup. Kesimpulan dari pengamatan Cook adalah koperasi menunjukkan perkembangan jika dilihat dari pertumbuhan nilai usaha dan perkembangan tersebut tidak berhubungan dengan waktu.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Hipotesa Cook menyimpulkan bahwa perkembangan koperasi, khususnya koperasi pertanian mengikuti empat tahap, dimana dua tahap adalah tahap "keseimbangan" dan dua tahap lainnya adalah tahap ketidakseimbangan. Koperasi pertanian di Amerika umumnya dikembangkan atas dua pertimbangan pokok yaitu pertama, untuk mengatur mengendalikan produksi dan pasokan diantara para produsen sehingga para produsen tidak saling bersaing. Kedua, untuk menghimpun para produsen (petani) guna menghadapi pasar yang tidak sempurna dalam monopoli atau oligopoli pada pasar sarana produksi dan monopsoni atau oligopsoni pada pasar produk. Kedua alasan tersebut pada dasarnya adalah usaha petani produsen atas inisiatif sendiri untuk bersama-sama berusaha bertahan menghadapi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga pada kondisi ini koperasi berada pada "tahap defensif". Hasil yang diharapkan dari koperasi pada tahap ini adalah peningkatan kekuatan rebut tawar petani (anggota)

yang diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku usaha koperasi.

2.3. Terminologi dan Definisi Operasional

Reposisi adalah upaya merubah posisi KUD yang hampir stagnan menuju posisi baru yang lebih variabel serta sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perlunya reposisi pengembangan kelembagaan koperasi pedesaan disebabkan karena terjadinya perubahan pemerintahan dan kebijakan dibidang ekonomi yang mengakibatkan KUD yang dikenal sebagai instrumen pemerintah mengalami kesulitan dan kehilangan arah.

Reposisi dimaksudkan agar KUD dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan. Posisi KUD sekarang dan reposisi yang diharapkan dapat digambarkan pada Tabel. 1 berikut :

Tabel. 1. Posisi KUD dan Reposisi yang Diharapkan

POSISI	REPOSISI
KUD koperasi tunggal di pedesaan	Koperasi lain dapat didirikan di desa; koperasi pendekatan komoditi; pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan
Inisiatif pemerintah; tidak otonom; anggota tidak merasa memiliki	Inisiatif masyarakat, otonom; menolong diri sendiri, milik anggota
Manajemen dan modal lemah, diantaranya in-efisiensi dan miss manajement	Manajemen profesional didukung SDM berkualitas; mampu memanfaatkan kesempatan untuk memupuk modal sendiri dan dapat dipercaya menerima pinjaman
Sifat serba usaha tanpa kompetensi bidang tertentu	Kompetensi dibidang pertanian; pendekatan komoditi dengan serba fungsi.
Dominasi kegiatan program dan di luar program tidak berkembang	Usaha sesuai kepentingan anggota; kewirusahaan; mampu bekerja dalam mekanisme pasar.
Peran pemerintah dominan; campur tangan dalam internal KUD	Pemerintah tetap mendukung dan memberi fasilitas; mengawasi tetapi tidak campur tangan.
Citra kurang baik; tidak dipercaya	Citra baik dan terpercaya; dipercaya anggota; dipercaya bank dan lembaga keuangan; dipercaya mitra bisnis.

METODE

3.1. Lokasi dan objek penelitian

Lokasi studi meliputi 10 propinsi : Sumut, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu,

Bali, NTB, NTT, Kalbar, Sulut. Desain penelitian ini dimulai dengan menentukan unit analisis atau sampel penelitian yang terdiri dari koperasi pertanian, anggota koperasi, petani yang ada di lokasi penelitian.

Penentuan lokasi secara purposive (*purposive sampling*) berdasarkan kesesuaian kajian sebelumnya pada perolehan informasi sesuai dengan tujuan dan output yang diharapkan dari masing-masing propinsi yang ditunjuk tersebut akan diambil sampel sebanyak dua kabupaten/kota setiap kabupaten/kota akan diambil masing-masing 2 koperasi yaitu koperasi pertanian dan non pertanian. Total koperasi adalah 40 koperasi.

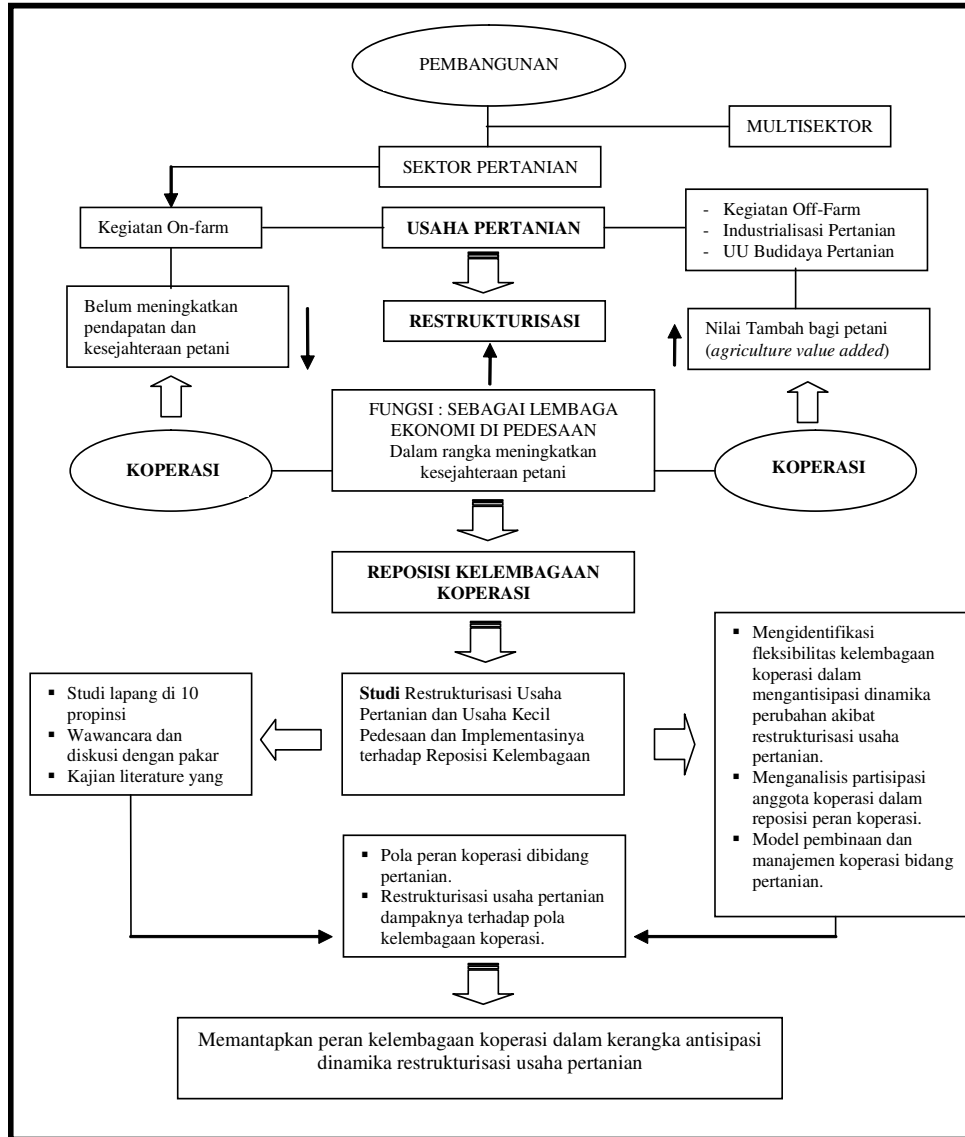
3.2. Instrumen dan Variabel Penelitian

Aspek studi meliputi : (a) melakukan studi dan evaluasi kondisi riil saat ini terhadap koperasi dibidang pertanian dan usaha kecil pedesaan, (b) mengklasifikasi tipe koperasi dibidang pertanian dan faktor-faktor penghambat, (c) menyusun disain pengembangan koperasi dibidang pertanian dan usaha kecil pedesaan, (d) menyusun *draft action* pengembangan koperasi dibidang pertanian.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data informasi dari kajian sebelumnya atau laporan dari departemen atau instansi yang terkait. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan pada saat melakukan survey ke koperasi yang menjadi sampel dalam studi ini. Partisipasi anggota koperasi di bidang perencanaan meliputi : (a) kehadiran setiap anggota dalam rapat yang diselenggarakan koperasi, (b) prakarsa mewujudkan koperasi yang memerlukan partisipasi anggota, (c) motivasi anggota mengikuti kegiatan koperasi, (d) keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi anggota meliputi : (a) penjualan hasil pertanian atau produk, (b) simpanan setiap anggota di koperasi, (c) pembelian kebutuhan sarana produksi, (d) pinjaman kredit.

Adapun untuk menyusun dan menyempurnakan model pembinaan dan pengembangan manajemen koperasi dibidang pertanian berdasarkan hasil *Focus group discussion* (FGD) dengan instansi terkait, gerakan koperasi.

3.3. Teknik dan Bagan Alur Analisis



3.4. Prosedur Penelitian

Pendekatan trend produktivitas dan dan pendekatan profil industri pengolahan berdasarkan ISIC (*International Standard Industry*), ini dimulai dengan melihat karakteristik pertanian secara nasional yaitu pendekatan trend produktivitas pertanian tahun 1993 sampai 2002 terutama pertanian tanaman pangan dan pendekatan profil industri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian secara umum yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Disamping hal tersebut juga akan dilakukan kajian literatur mengenai restrukturisasi usaha pertanian yang relevan dan bisa memberikan gambaran pola restrukturisasi pertanian yang diharapkan dalam kajian ini. *Best practices* juga akan melengkapi kajian ini agar dapat dilihat praktek di lapangan beberapa koperasi yang telah berhasil melakukan reposisi kelembagaan. Selanjutnya untuk menyusun dan menyempurnakan model pembinaan dan pengembangan manajemen koperasi bidang pertanian dilaksanakan menggunakan *focus group discussion* (FGD).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data yang merupakan informasi dari kajian sebelumnya atau laporan dari departemen atau instansi yang terkait. Data sekunder ini akan diperoleh pada Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Industri dan Perdagangan, Departemen Pertanian, BPS dan dinas-dinas yang terkait serta lembaga non pemerintahan yang mempunyai hubungan dengan kinerja koperasi.

Penyuntingan data yang meliputi : (1) pemeriksaan kelengkapan pengisian daftar pertanyaan, (2) memeriksa kesesuaian jawaban satu sama lain, (3) mengadakan tabulasi dan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS versi 11.0.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola pengembangan koperasi (KUD) pada masa lalu ditentukan oleh wilayah keanggotaannya yaitu beberapa desa dalam satu kecamatan, artinya boleh lebih dari satu desa tetapi tidak boleh lebih dari satu kecamatan. Keterbatasan seperti itu sangat menghalangi gerak dan kemajuan unit koperasi tersebut, oleh sebab itu pada masa yang akan datang hal-hal seperti itu perlu dihilangkan sehingga prinsip koperasi dimunculkan oleh kepentingan yang sama dari kelompok masyarakat tidak lagi bisa dibatasi oleh wilayah administrasi tapi lebih ditentukan oleh kepentingan dibentuknya koperasi tersebut.

Pembahasan Hasil Temuan dan Pengujian

1. Sektor pertanian menyumbang 2,48% terhadap PDB nasional, namun jumlah petani gurem di Indonesia juga semakin meningkat. Usaha pertanian dikembangkan dengan cara usaha tani intensifikasi juga dengan mengembangkan sektor *off-farm*-nya. Industrialisasi pertanian kita diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi dan persaingan komoditi dan mendapatkan *value added* dari sektor pertanian perlu dilakukan pengolahan

hasil-hasil pertanian menjadi industri olahan, disamping meningkatkan pendapatan keluarga petani juga akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan membuka peluang ekspor.

2. Peran koperasi di sektor *off-farm* (industri pengolahan) pada usaha pertanian masih tergolong sangat rendah bila dilihat dari status badan hukum sebagai industri pengolahan berbasis sektor pertanian. Kurang dari 1% jumlah koperasi yang usahanya bergerak dalam industri pengolahan pertanian, kecuali di sub sektor peternakan lebih dari 3%. Pada usaha pertanian di sektor hilir (*off-farm*), sebagian besar industri termasuk didalamnya usaha koperasi yang bergerak di industri pengolahan mengalami persaingan pasar oligopoli yang sangat ketat, seperti pada industri penggilingan dan penyosohan beras dengan Rasio Konsentrasi sebanyak delapan perusahaan terbesar (CR 8) hanya sebesar 25,72% pada tahun 2002. hal ini diperlukan kebijakan pemerintah sehingga diharapkan koperasi bisa melakukan monopoli pada industri pengolahan seperti pada pembelian cengkeh di zaman orde baru. Disamping itu skala output koperasi sebagian besar hanya berada di bawah satu miliar sehingga suntikan modal bagi koperasi sangat diperlukan baik dari lembaga keuangan perbankan maupundari pemerintah. Distribusi lokasi industri pengolahan diatas 80% jumlah industri masih terkonsentrasi di daerah Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Ini memberikan gambaran pembangunan industri pertanian antara lokasi industri dengan sumber bahan baku tidak satu tempat, sehingga akan memberikan biaya pengangkutan yang cukup besar. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan industri pengolahan sebagian masih diimpor. Seperti pada industri pakan ternak dan industri penggilingan dan pembersihan padi-padian bahan bakunya diatas 40% masih diimpor.
3. Berdasar hasil survei tingkat partisipasi pertemuan kelompok tani yang aktif rata-rata 11-12 kali setahun seperti *wire single*, Lombok Barat, NTB, sedang koperasi yang pasif melakukan pertemuan anggota rata-rata 1 kali setahun. Anggota koperasi berinisiatif tinggi untuk mewujudkan kegiatan mendirikan koperasi pertanian (71,14%), penyaluran kredit di koperasi (71,4%), penyaluran sarana produksi pertanian (64,3%), pemasaran hasil pertanian (78,6%). Rangsangan anggota mengikuti kegiatan perkoperasian terutama disebabkan untuk memperoleh kredit program (35,71%), kemudahan mendapatkan saprotan (19,05%), kemudahan dalam pemasaran hasil pemasaran (14,29%). Alasan responden mau mengambil kredit karena bunganya rendah (50%) pengembaliannya berjangka (28,57%), dan alasan lainnya (14,27%). Dalam proses pengambilan keputusan 85,7% anggota koperasi menyatakan pengambilan keputusan penyaluran kredit usaha tani dilakukan melalui musyawarah kelompok. Sedangkan keputusan untuk bermitra dengan pengusaha 28,6% diambil sesuai dengan keinginan anggota, sedangkan 71,3% masih karena inisiatif pengurus. Dinas koperasi sebagai pembina koperasi selama ini melakukan dukungan dan fasilitasi melalui pelaksanaan

kegiatan pelatihan, latihan, kursus, dan koordinasi dengan koperasi, Dinas Koperasi Tk I dan II dan dinas lainnya.

4. Model pembinaan dilakukan dengan : 1) peningkatan pengembangan skala usaha koperasi untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi pelaku ekonomi, dilakukan dengan pemberian bantuan sarana usaha, bantuan perkuatan permodalan bergulir, peningkatan kualitas produk dengan pelatihan dan mengadakan temu usaha dan konsultasi, 2) peningkatan pengembangan bagi koperasi dalam rangka penciptaan kesempatan usaha, kepastian pasar dan harga bagi usaha yang dikembangkan oleh koperasi, 3) peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan koperasi, 4) peningkatan dan pengembangan sarana usaha koperasi dalam rangka peningkatan kemampuan koperasi menggunakan teknologi yang sesuai dengan teknologi anggota, 5) memfasilitasi serta melakukan mediasi dalam rangka melakukan kerjasama usaha antara Koptan, Puskoptan, Inkoptan dengan pihak swasta, BUMN, perbankan serta lembaga keuangan lainnya.

Tabel 1. Kondisi Sektor Pertanian

No	Sektor	Jumlah Perusahaan (Unit)	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
1	Pangan	2.325	1.785
2	Hortikultura	265	1.431
3	Peternakan	85	1.150
4	Perikanan	539	1.127
5	Perkebunan	2.712	8.862
	Jumlah	5.926	16.140
	Rata-rata	1.185.2	3.226

Tabel 2. Persentase jumlah Badan Hukum perusahaan industri pengolahan yang bergerak dalam bidang pertanian tahun 2002

No.	Uraian	Jumlah Perusahaan (%)													Jml
		PN	PD	Per-sero	Perum	Swas-ta	NT	CV	Fa	Kop	Yaya-san	Lain-nya	Tdk BH		
1	Pangan	0,09	0,48	0,29	0,01	26,6	0,12	4,21	0,35	0,62	0,12	0,12	34,5	99,89	
2	Hortikultura	0,26	1,85	2,05	0,00	42,6	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1	99,83	
3	Peternakan	0,98	1,96	0,98	0,00	36,8	0,00	13,8	0,72	2,17	0,00	0,00	10,0	99,91	
4	Perikanan	0,11	0,50	0,54	0,00	18,4	0,42	3,71	0,00	0,17	0,00	0,00	40,7	99,85	
5	Perkebunan	0,73	0,68	5,52	0,05	36,6	0,31	3,03	0,40	0,14	0,02	0,02	22,2	99,88	

Tabel 3. Persentase pendapat responden terhadap restrukturisasi pertanian

No.	Harapan Responden/Masyarakat	%
1	Memperoleh kredit program	71,4
2	Kemudahan memperoleh saprodi	64,3
3	Pemasaran hasil pertanian	78,6

Tabel 4. Persentase anggota koperasi terhadap peran koperasi pertanian

No.	Pendapat anggota terhadap sektor pertanian	%
1	Mendirikan koperasi pertanian	71,4
2	Koperasi menyalurkan kredit	64,3
3	Pemasaran hasil pertanian	78,6

Tabel 5. Peran koperasi dalam sektor pertanian

No.	Uraian	Sektor Pertanian	Sektor Koperasi	Peran Koperasi thd Sektor Pertanian
1	Penyerapan tenaga kerja (orang)	16.140	46.795	2,3 %
2	Persentase (%)	96,9	3,1	3,1%
3	PDB (%)	17,47	0,34	3,22%
4	Pendapatan per kapita per tahun (juta)	78,590	68,34	

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Peran koperasi di sektor *off-farm* (industri pengolahan) pada usaha pertanian masih tergolong sangat rendah bila dilihat dari status badan hukum sebagai industri pengolahan berbasis sektor pertanian kurang dari 1 % jumlah koperasi yang usahanya bergerak dalam industri pengolahan pertanian, kecuali di sub sektor peternakan lebih dari 3%.

Pada usaha pertanian di sektor hilir (*off-farm*), sebagian besar industri termasuk di dalamnya usaha koperasi yang bergerak di industri pengolahan mengalami persaingan pasar oligopoli yang sangat ketat, seperti pada industri penggilingan dan penyosohan beras dengan rasio konsentrasi sebanyak delapan perusahaan terbesar (CR 8) hanya sebesar 25,72% pada tahun 2002. Hal ini memerlukan kebijakan pemerintah sehingga diharapkan koperasi dapat melakukan monopoli pada industri pengolahan seperti pada pembelian cengkeh di zaman orde baru. Disamping itu skala output koperasi sebagian besar hanya berada di bawah Rp. 1 milyar, sehingga suntikan modal bagi koperasi sangat diperlukan baik dari lembaga keuangan perbankan maupun dari pemerintah.

Distribusi pengolahan diatas 80% masih terkonsentrasi di daerah Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah) dan Sumatera utara. Ini memberikan gambaran, bahwa dalam pembangunan industri pertanian antara lokasi industri dengan sumber bahan baku tidak satu tempat, sehingga akan menimbulkan biaya transportasi yang cukup besar. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan industri pengolahan sebagian masih diimpor, seperti pada industri pakan ternak, industri penggilingan, dan pembersihan padi-padian bahan bakunya di atas 40% masih diimpor.

Untuk menunjang peningkatan usaha pertanian menjadi industri pertanian perlu dilakukan membina sumberdaya manusia dan memantapkan struktur kelembagaan koperasi sebagai upaya mendukung pengembangan usaha anggota koperasi yang berbasis pada pertanian.

Model kelembagaan agribisnis yang dapat dikembangkan di masa depan antara lain dengan memasukkan unsur petani menjadi salah satu faktor dari *supply chain manajemen*, dimana petani posisikan sebagai subyek pengambil keputusan bukan hanya pelaksana.

Model koperasi tunggal komoditi dapat dikembangkan untuk sub sektor perkebunan untuk komoditi : karet, kelapa sawit dan kelapa hibrida, sub sektor pertanian tanaman pangan : cabai, tomat, bawang daun, dll, sub sektor perikanan dan subsektor peternakan. Koperasi persusuan merupakan salah satu koperasi yang mampu berkembang dengan baik.

Koperasi kredit pertanian diperlukan oleh petani untuk membiayai usaha taninya. Koperasi pertanian merupakan basis dari pemberdayaan petani dan menjadi landasan bagi pengembangan kegiatan lainnya.

5.2. Saran

- Perlu diterapkan hasil identifikasi industri pengolahan yang prospektif untuk mendukung restrukturisasi usaha pertanian dan meningkatkan *value added* usaha pertanian melalui industri pengolahan.
- Dalam proses pembinaan untuk mendapatkan hasil yang baik perlu adanya keterpaduan dalam pembinaan koperasi dengan melakukan fasilitator, pelatihan dan pendampingan.
- Pola restrukturisasi pertanian seperti pada Bank Padi dimana koperasi berperan besar dalam pengolahan gabah petani hingga pemasaran dan simpan pinjam dalam bentuk natuna harus dikembangkan tidak saja di Jawa tetapi juga di luar Jawa.
- Diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis didukung dengan kemitraan dengan BUMN dan pihak swasta yang diharapkan dapat membantu memantapkan kelembagaan koperasi dan memajukan usaha koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

-, 2001. **Statistik Perusahaan Perikanan 2001**. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
-, 2002. **Indikator Pertanian (agricultural Indicators) 2002**. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
-, 2003. **Sensus Pertanian 2003**. Angka Nasional Hasil Pendaftaran Runah Tangga (angka sementara). Badan Statistik. Jakarta.
- Cook, Michael. 1995. **The Future of U.S Agricultural Cooperative: A Neo Institutional Approach**. American Journal of Agricultural Economics. Desember 1995.
- Nasution, M., 2003. **Pertanian Sebagai Platform Pembangunan Indonesia Masa Depan**. Makalah Kongres Masyarakat Pertanian Indonesia. BEM IPB. Bogor , 16 September 2003.
- PERHEPI. 2004. **Rekonstruksi dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian : Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan**. Perhepi Cetakan I. Jakarta.
- Soetrisno, N. 2003. Koperasi Indonesia : **Potret dan Tantangan, Jurnal Ekonomi Kerakyatan**, Th. II-No.5-Agustus 2003. Jakarta.
- Sularso. 2004. **Koperasi Pertanian**. Makalah Diskusi Terbatas PERHEPI : Kelembagaan dan Koperasi dalam Restrukturisasi Pertanian Perdesaan. STEKPI, 30 September 2004.